



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Karimun

Dahulu, Karimun berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh agama Budha mulai masuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti di Desa Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh Kerajaan Malaka (Islam) mulai masuk tahun 1414. Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah memberi larangan pada keturunan raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, lalu muncullah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri, dan Indrapuri. Sementara itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk Pulau Karimun. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591). Pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga dan pada masa itu daerah Karimun, terutama Kundur dikenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang (seperti : timah, granit, dll) dan Karimun berkembang menjadi daerah perdagangan serta mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji. Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, Kerajaan Riau-Lingga dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerajaan Melayu dilebur menjadi satu sehingga semakin kuat dengan wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Riau, daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai District Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder District Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yang dibagi menjadi 2 (dua) Afdelling, yaitu : Afdelling Tanjungpinang dan Afdelling Indragiri. Berdasarkan Surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deptr. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi 4 (empat) kawedanan sebagai berikut :

1. Kawedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan
2. Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro
3. Kawedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang
4. Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kawedanan dalam kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Akhirnya, Karimun diresmikan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri dengan terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 24 (dua puluh empat) desa.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 19 (sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. Setelah itu Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22 (duapuluh dua) kelurahan dan 32 (tigapuluh dua) desa.

Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan Juli 2012, wilayah Kabupeten Karimun kembali mekar menjadi 12 (dua belas) kecamatan, dengan 42 (empat puluh dua) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan

## 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Karimun

Visi :

Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”



Misi :

Misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan pemeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa;
3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan;
4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik; dan

Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten Karimun mempunyai MOTTO sebagai berikut:

1. Kerja Amanah
2. Kerja Keras
3. Kerja Cerdas
- 4 (empat) Azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:
  1. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa.
  2. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  3. Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan.
  4. Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 4.3 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00°24'36" LU sampai 01°13'12" LU dan 103°13'12" BT sampai 104°00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (*Phillip channel*). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.

Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu:

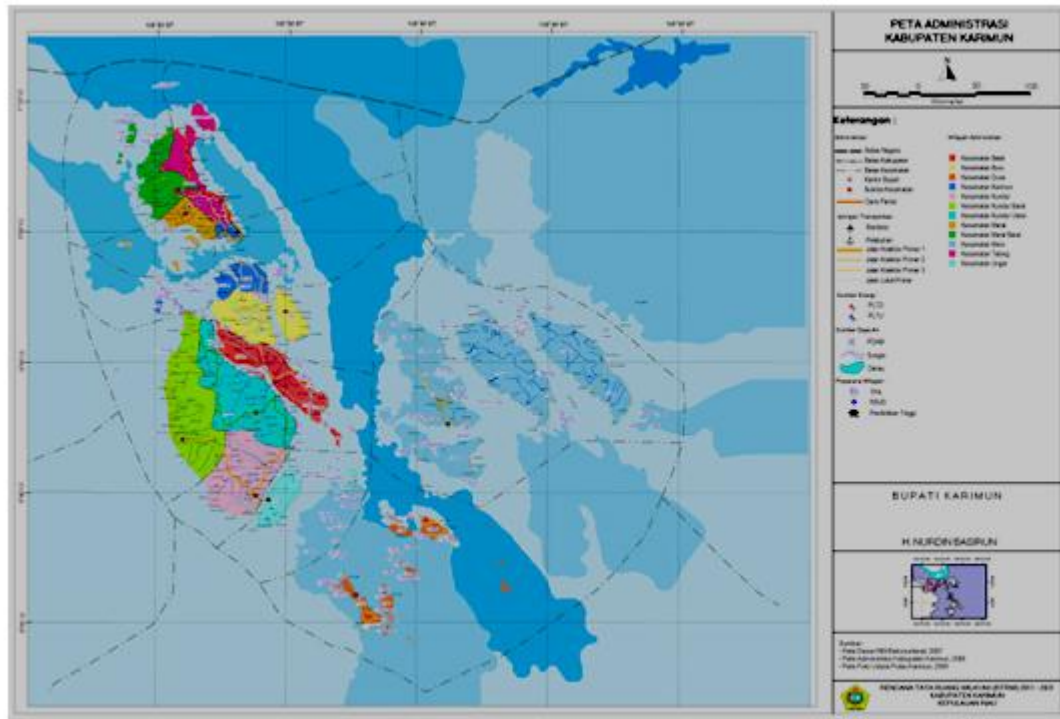
- Utara : Selat Singapura (*Phillip Channel*), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia.
- Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga.



Barat : Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).  
Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Karimun  
Sumber : Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2015*

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2015**

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				JUMLAH PULAU
			KELURAHAN	DESA	RW	RT	
1	Moro	Moro	2	10	49	139	<b>84</b>
2	Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	<b>11</b>
3	Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	<b>24</b>
4	Karimun	Tanjung Balai	6	3	39	139	<b>23</b>
5	Buru	Buru	2	2	29	64	<b>6</b>
6	Meral	Meral	6	–	30	119	<b>24</b>
7	Tebing	Tebing	5	1	24	73	<b>5</b>
8	Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	–
9	Belat	Sebele	–	6	28	65	–
10	Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	–
11	Durai	Durai	–	4	13	36	<b>46</b>
12	Kundur	Tanjung Batu	3	3	51	145	<b>26</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>29</b>	<b>42</b>	<b>392</b>	<b>1086</b>	<b>249</b>

Sumber: *Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015*

#### 4.4 Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.524 Km<sup>2</sup> luas daratan dan 6.460 Km<sup>2</sup> luas lautan. Kecamatan Moro merupakan wilayah terbesar dengan total wilayah sebesar 2.835,24 Km<sup>2</sup> atau 35,51%. Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit – bukit dengan kemiringan sampai 40° serta ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat malaka.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan**

Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
	Administrasi		Terbangun	
	(Ha)	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
Moro	24.073	25,84	23	6.30
Kundur	8.785	9,43	42	11.51
Karimun	3.625	3,89	71	19.45
Meral	2.535	2,72	56	15.34
Tebing	5.171	5,55	33	9.04
Buru	6.646	7,13	13	3.56
Kundur Utara	9.391	10,08	16	4.38
Kundur Barat	13.237	14,21	22	6.03
Durai	3.571	3,83	8	2.19
Meral Barat	5.600	6,01	34	9.32
Ungar	3.658	3,93	23	6.30
Belat	6.865	7,37	24	6.58
<b>Total</b>	<b>93.157</b>	<b>100</b>	<b>365</b>	<b>100</b>

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun Tahun 2015

**Tabel 4.3**  
**Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Luas Daratan (Ha)	Penduduk*	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Moro	44.792,39	18.348	41
2	Durai	6.298,27	6.472	103
3	Kundur	8.373,70	29.681	354
4	Kundur Utara	24.564,71	11.751	48
5	Kundur Barat	18.992,39	17.359	91
6	Ungar	5.552,94	6.128	110
7	Belat	10.934,26	6.646	61
8	Karimun	5.976,47	44.666	747
9	Buru	7.339,79	9.462	129
10	Meral	5.785,47	38.831	671
11	Tebing	7.634,60	24.415	320
12	Meral Barat	6.155,02	12.107	197
<b>Jumlah</b>		<b>152.400,00</b>	<b>225.866</b>	<b>1,48</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2015





## Struktur Usia Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan suatu daerah. Dilihat dari tabel dibawah, berdasarkan dari data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun ada kenaikan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1,01 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada batas wajar mengingat wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi.

Dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Karimun termasuk umur muda, lebih dari separuh penduduk (54,10 persen) berada pada golongan umur **20-59 tahun**. Golongan ini merupakan golongan umur yang sedang aktif bekerja (produktif). Penyediaan lapangan usaha yang sebanyak-banyaknya sangat diperlukan. Golongan umur terbesar kedua adalah umur **5-19 tahun** sebanyak 66.091 orang (29,63 persen). Golongan umur ini merupakan golongan usia sekolah sehingga sangat diperlukan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. Sedangkan untuk golongan umur lebih dari 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit sekitar 6,68 persen dari total penduduk tahun 2015.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2014-2015**

No	Kelompok Usia	2014	%	2015*	%
1	0 – 4 Tahun	21.446	9.61	21.595	9,59
2	5 – 19 Tahun	66.091	29.62	66.771	29,63
3	20 – 59 Tahun	120.806	54.14	121.886	54,10
4	>59 Tahun	14.774	6.62	15.046	6,68
<b>JUMLAH</b>		<b>223.117</b>	<b>100</b>	<b>225.298</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.5 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun disajikan pada tabel 1.5 dibawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
1	2011	216.146	1,69
2	2012	218.475	1,08
3	2013	220.882	1,10
4	2014	223.117	1,01
5	2015	225.866	1,23

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2015*

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Karimun mencapai 148 jiwa per Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Karimun mencapai 747 jiwa per Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Moro sebesar 41 jiwa per Km<sup>2</sup>. Adapun data kepadatan penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2015**

N O	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS (K M <sup>2</sup> )	KEPADATAN PENDUDUK(JIWA/K M <sup>2</sup> )
1	Karimun	44.666	59,76	747
2	Meral	38.831	57,85	671
3	Tebing	24.415	76,35	320
4	Meral Barat	12.107	61,55	197
5	Kundur	29.681	83,74	354
6	Kundur Utara	11.751	245,65	48
7	Kundur Barat	17.359	189,92	91
8	Moro	18.348	447,92	41
9	Durai	6.472	62,98	103
10	Buru	9.462	73,40	129
11	Belat	6.646	109,34	61
12	Ungar	6.128	55,53	110
<b>Jumlah</b>		<b>225.866</b>	<b>1.524</b>	<b>148</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, Tahun 2015*

#### 4.6 Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Pembentukan Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap di Kabupaten Karimun didasarkan kepada perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Kabupaten Karimun yang baru terbentuk mendorong Pemerintah Kabupaten Karimun untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.

Akibat dari itu semua membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah menjadi terhambat yang juga otomatis berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Kabupaten Karimun segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 Tahun 1993 dengan membentuk kelembagaan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan maksud untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan sistem pelayanan perizinan terpadu yang dilakukan secara terkoordinir bersama instansi teknis yang berkompeten didalam proses penerbitan perizinan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu.

Derasnya arus reformasi telah mendorong terjadinya perubahan di berbagai sektor. Demikian juga di sektor pelayanan publik. Masyarakat menuntut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya perubahan kualitas pelayanan publik menjadi semakin lebih baik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Karimun pada era ini dirasakan masih belum memadai dan belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat, antara lain masih lambatnya proses penerbitan perizinan yang disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati Karimun kepada Kepala Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap sehingga dalam proses penerbitan sebuah perizinan harus melalui rekomendasi dinas atau instansi teknis dan apabila setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis baru ditandatangani oleh Bupati.

Tahapan proses perizinan yang sedemikian merupakan perpanjangan birokrasi yang dapat mengakibatkan penerbitan perizinan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena, dalam rangka pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat maka diterbitkanlah Keputusan Bupati Karimun Nomor 118 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan untuk memberikan izin kepada dinas atau instansi sebagai penyelenggara perizinan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Kepala Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, antara lain belum memiliki anggaran dan personalia yang tetap dikarenakan belum berbentuk SKPD tersendiri sehingga dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya untuk operasional kantormelekat dibebankan kepada





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKPD teknis terkait. Berangkat dari keterbatasan tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan sebagai upaya perubahan paradigma memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik maka melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 maka Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun yang ditetapkan oleh Bupati Karimun tanggal 30 November 2006 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2006 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Badan Pelayanan Terpadu berganti nama menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi SKPD tersendiri.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Memang tidak semua urusan pemerintahan akan dibentuk dalam suatu organisasi tersendiri, namun mengingat urusan penanaman modal cukup strategis, maka pada Pemerintah Kabupaten Karimun memandang perlu untuk mengubah susunan organisasi pelaksana penanaman modal dari semula Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7) serta kewenangan menerbitkan izin sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2016.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Serta berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) jenis izin yang telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan status susunan organisasi kelembagaan yang baru ini maka penanaman modal merupakan menjadi salah satu tugas pokok, dan fungsi sehingga mulai saat ini pelaksanaan urusan ini melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yang salah satu tugas prioritasnya adalah percepatan iklim investasi dan iklim usaha yang diamanatkan untuk melaksanakan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. Disamping itu, pada susunan organisasi ini terdapat



penambahan unsur pengaduan dan pengawasan sehingga dengan adanya unsur-unsur kelembagaan tersebut maka semakin besar peranan dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan diharapkan akan mampu untuk mengelola kewenangan yang ditangani

#### 4.7 Visi dan Misi

Visi :

Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Misi :

Misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan pemeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa;
3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan;
4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik; dan Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.8 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
7. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

**Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan aset serta pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
3. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
6. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;
8. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Subbagian Kepegawaian dan Umum**, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
2. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
3. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
4. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
5. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (sdm) pegawai;
7. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
2. Pemberian petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
4. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:

1. Seksi Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal;
2. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

**Seksi Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal,** mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengembangan iklim investasi penanaman modal.

Seksi Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan pengembangan iklim investasi penanaman modal;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang perencanaan pengembangan iklim investasi penanaman modal;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perencanaan pengembangan iklim investasi penanaman modal;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal kabupaten;
5. Penyiapan bahan penyusunan kajian rencana umum penanaman modal (rupm) sesuai dengan program pembangunan daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan iklim investasi penanaman modal kabupaten;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim investasi penanaman modal kabupaten;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Perencanaan Penanaman Modal**, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang perencanaan penanaman modal;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
4. Penyiapan bahan pedoman tata cara pembangunan dan penjabaran sistem informasi penanaman modal;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan penjabaran kerja sama, investasi, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan penanaman modal;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah**, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan usaha Daerah.

Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan usaha Daerah;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan usaha Daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, keabsahan dan sumber daya manusia termasuk koperasi mikro, kecil, menengah dan besar;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha Daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha Daerah;
6. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan usaha Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **3. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas membantu kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
2. Pemberian petunjuk teknis dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
4. Pemberian petunjuk teknis pendataan dan pengolahan dalam bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Pemberian petunjuk teknis pemetaan data dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
6. Pelaksanaan promosi dan kerjasama mengenai potensi daerah;
7. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi:

1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal;
2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

**Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal**, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal.

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengumpulan dan pengolahan data kaitan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyiapan bahan pelaksanaan dan peremajaan data dan pengumpulan data realisasi izin penanaman modal secara berkala dan insidentil;

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal;

1. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal ;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Penyiapan bahan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
6. Penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, promosi, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal,**

mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

### Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
4. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
5. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### **4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan**

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas membantu bidang merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
2. Pemberian petunjuk teknis dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
4. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian bahan perumusan program kerja dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan, membawahi:

1. Seksi pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
2. Seksi pengawasan dan kemudahan investasi; dan
3. Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman Modal dan Perizinan.

**Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penanaman Modal dan Perizinan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penanaman Modal dan Perizinan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
4. Pemberian petunjuk pelaksanaan pengkajian pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
5. Penyiapan bahan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantauan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Pengawasan dan Kemudahan Investasi**, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengawasan dan kemudahan investasi.

Seksi Pengawasan dan Kemudahan Investasi menyelenggarakan fungsi:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengawasan dan kemudahan investasi;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis pengawasan dan kemudahan investasi;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengawasan dan kemudahan investasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan peta investasi daerah dan indentifikasi potensi sumber daya daerah;
5. Penyiapan bahan pedoman pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan dan kemudahan investasi;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan kemudahan investasi;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan kemudahan investasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan**

**Perizinan**, membantu kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

### Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
3. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
5. Penyiapan bahan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan kinerja pelayanan;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
8. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **5. Bidang Pelayanan Perizinan**

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelayanan perizinan;
2. Pemberian petunjuk teknis dibidang pelayanan perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelayanan;
4. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang pelayanan perizinan;
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang pelayanan perizinan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan perizinan;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan Perizinan; dan
3. Seksi Bimbingan dan Fasilitasi Perizinan.

**Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan Perizinan,** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan.

Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan;
4. Penyiapan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyelenggaraan kegiatan dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaduan dan informasi pelayanan perizinan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Seksi Bimbingan dan Fasilitas Perizinan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan dan fasilitas perizinan.

Seksi Bimbingan dan Fasilitas Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bimbingan dan fasilitas perizinan;
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang bimbingan dan fasilitas perizinan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang bimbingan dan fasilitas perizinan;
4. Penyiapan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitas dibidang bimbingan dan fasilitas perizinan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bimbingan dan fasilitas perizinan;

6. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan dan fasilitasi perizinan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.